



News Title : Lindungi Masyarakat, Kemendag Tertibkan Robot Trading Tak Berizin

Media Name : penabicara.com

Journalist : -

Publish Date : 29 January 2022

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Sihard Hadjopan Pohan (Direktur Tertib Niaga), Veri Anggrijono (Direktur Jenderal PKTN), Indrasari Wisnu Wardhanajuga (Plt Kepala Bappebti)

Ads Value : 0

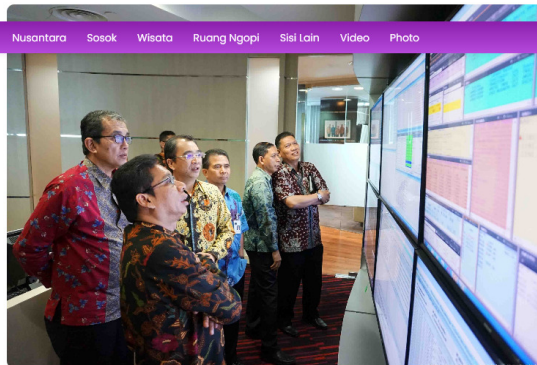
Section/Rubrication : Nusantara

Topic : Robot Trading

Nusantara

Lindungi Masyarakat, Kemendag Tertibkan Robot Trading Tak Berizin

Megawati - Sabtu, 29 Januari 2022 | 08:41 WIB



Lindungi Masyarakat, Kemendag Tertibkan Robot Trading Tak Berizin. (Sumber: Kominfo)

Penabicara.com - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Kementerian Perdagangan tertibkan **robot trading** takberizin

Tindakan tegas itu dilakukan terhadap usaha penjualan **expert advisor** atau **robot trading** tak berizin **PT DNA Pro Akademi** pada hari Jumat di Jakarta Pusat, Jumat 28 Januari 2022, untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal.

"Kegiatan penertiban ini merupakan hasil temuan pengawasan terhadap **PT DNA Pro Akademi** yang telah menjalankan kegiatan usaha penjualan **expert advisor** atau **robot trading**," ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono seperti dikutip dari laman resmi Kominfo.

Baca Juga: Kemenkes Terbitkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Internasional sesuai Standar WHO, Bermanfaat Bagi PPLN

Advisor atau **robot trading** tersebut menggunakan sistem **MLM** atas dasar legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (**NIB**) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999 (perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya) yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi, atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung.

Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha penjualan langsung termasuk dalam kategori risiko tinggi.

"Pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dikenakan ketentuan pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja-Sektor Perdagangan," tutur Pohan.

Baca Juga: Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng, Pemerintah Terapkan Kebijakan DMO dan DPO

Sementara Plt. Kepala **Bappebti** Indrasari Wisnu Wardhanajuga mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi.

"Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha di www.bappebti.go.id. Sedangkan para pelaku usaha diharapkan dapat mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,"ungkap Wisnu.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan [Bappebti](#) Aldison menambahkan, kegiatan pengamanan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak taat ketentuan dan memberikan contoh kepada pelaku usaha lain agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.

Baca Juga: [Merinding! Gedung Sekolah Tiba-tiba Jadi Angker Sejak Kosong Akibat Pandemi, Ada Kuntilanaknya](#)

"Kegiatan ini juga dilakukan oleh [Kemendag](#) sebagai anggota Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi untuk menindaklanjuti keputusan Satgas yang telah melarang kegiatan usaha [PT DNA Pro Akademi](#) pada Januari 2022," jelasnya.***